

Dinakodai Hj Norma Adios, PMI Buton Selatan Libatkan TNI, Polri, dan Warga Gelar Donor Darah Massal, 83 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Buton Selatan menargetkan pengumpulan 150 kantong darah dalam kegiatan donor darah massal yang digelar sebagai upaya mengatasi keterbatasan stok darah untuk kebutuhan medis di wilayah tersebut. Demikian dikatakan Ketua PMI Buton Selatan Hj Siti Norma Adios melalui Wakil Ketua PMI Buton Selatan Muhammad Arman Bonu.

Kegiatan yang berlangsung terbuka untuk umum ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat. Hingga pelaksanaan berakhir, jumlah pendonor telah mendekati 100 orang dan terus ber-

Lanjut ke Hal: 7

Wa Ode Munanah Lantik DWP Buton Selatan 2024- 2029, Bupati H Muh Adios Harap DWP Jadi Motor Pemberdayaan Keluarga dan Hadirkan Program Nyata untuk Warga



Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton Selatan masa bakti 2024-2029 resmi dikukuhkan

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton Selatan masa bakti 2024-2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Gedung Lamaindo, Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat (17/4/2026). Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran organisasi pem-

puan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keluarga.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Munanah Asrun Lio serta dihadiri Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sejumlah asisten, staf ahli bupati, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir dalam acara

tersebut.

Dalam rangkaian acara, pengukuhan kepengurusan baru ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai awal penguatan fungsi sosial DWP di tingkat daerah. Organisasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios,

Lanjut ke Hal: 7

PPKB Buton Selatan Siapkan Roadmap Kependudukan Berbasis Data SIGA, Susun Strategi Tekan Stunting, dan Kendalikan Penduduk



Kepala Dinas PPKB Buton Selatan La Ode Karman SE MM bersama stafnya

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP -Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya untuk menekan angka stunting dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk pada 2026 melalui pendekatan terpadu berbasis data dan edukasi masyarakat.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pengendalian penduduk yang kini masih dalam proses perencanaan dan

pengumpulan data-data pendukung yang akan segera di realisasikan dalam waktu dekat dan akan digunakan sebagai acuan kebijakan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan.

Kepala Dinas PPKB Buton Selatan La Ode Karman SE MM mengatakan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda strategis nasional yang menempatkan isu kependudukan dan stunting sebagai prioritas pembangunan.

“Fokus kami ada dua, yakni pengendalian angka kelahiran melalui pro-

gram KB serta percepatan penurunan stunting di masyarakat,” ujar Karman.

Dalam implementasinya, PPKB Buton Selatan mengintegrasikan sistem digital Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk memantau kondisi keluarga, distribusi alat kontrasepsi, serta capaian layanan kesehatan secara real time.

Pemanfaatan teknologi ini dinilai penting, mengingat secara historis pemerintah Indonesia telah lama mendorong pen-

Lanjut ke Hal: 7

Hibah atau Waris? ATR/BPN Ungkap Cara Tepat Proses Balik Nama Sertipikat Tanah Orang Tua ke Anak



Laporan: Amat jr

JAKARTA, BP -Proses balik nama sertipikat tanah dari orang tua kepada anak dinilai masih kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait prosedur dan biaya yang harus dipenuhi. Padahal, pengurusan sejak dini dapat mencegah beban biaya yang lebih besar

di kemudian hari.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menegaskan bahwa pengalihan hak atas tanah dalam lingkup keluarga tidak terjadi secara otomatis meskipun hubungan darah sudah jelas.

“Jadi balik nama itu

adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru yang sah secara hukum,” ujar Shamy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia mengingatkan, banyak masyarakat baru menyadari pentingnya balik nama ketika tanah hendak dijual atau dijadikan jam-

Lanjut ke Hal: 7

Dinakodai Hj Norma Adios, PMI Buton Selatan Libatkan TNI, Polri, dan Warga Gelar Donor Darah Massal, 83 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

tambah.

Muhammad Arman Bonu mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengaktifkan kembali program sosial PMI setelah kepengurusan baru dilantik pada 20 Desember 2025.

“Sejak dilantik, kami berupaya mendorong kegiatan sosial yang berdampak langsung. Donor darah ini menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi PMI kepada masyarakat,” ujar Arman.

Ia menambahkan, kebutuhan darah di rumah sakit masih menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat, terutama ketika terjadi kondisi darurat medis.

“Kita sering mendengar masyarakat kesulitan mendapatkan darah. Kondisi ini bisa menghambat penanganan medis dan berisiko bagi keselamatan pasien,” katanya.

Menurut Arman, kegiatan donor darah tidak hanya bernilai kemanusiaan, tet-

pi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor.

“Donor darah bukan hanya membantu sesama, tetapi juga baik untuk menjaga kebugaran tubuh pendonor,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, unsur TNI yaitu Batalyon Inf 871/La Maindo, Polri yaitu Brimob Batauga, tenaga medis, serta partisipasi aktif masyarakat.

PMI memastikan seluruh proses donor dilakukan sesuai standar medis, dengan setiap pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan, seperti pengecekan tekanan darah dan kondisi fisik.

Darah yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke bank darah di Kota Baubau. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Buton Selatan hingga kini belum memiliki fasilitas penyimpanan darah sendiri.

Kondisi keterbatasan bank darah

di daerah bukan hanya terjadi di Buton Selatan. Secara nasional, Palang Merah Indonesia mencatat kebutuhan darah mencapai sekitar 5,2 juta kantong per tahun, sementara ketersediaannya masih sering mengalami kekurangan di sejumlah daerah.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mencatat bahwa kebutuhan darah terus meningkat, terutama di negara berkembang, seiring bertambahnya kasus penyakit kronis, kecelakaan, serta tindakan medis seperti operasi besar.

Dalam konteks sejarah, gerakan donor darah telah menjadi bagian penting dari layanan kemanusiaan sejak diperkenalkan secara luas pada awal abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia I, ketika kebutuhan transfusi darah meningkat drastis.

Arman menegaskan, ke depan PMI Buton Selatan berencana menjadikan kegiatan donor darah sebagai agenda rutin

yang dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam setahun.

“Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Donor darah adalah aksi kemanusiaan yang sangat dibutuhkan,” katanya.

Ia juga berharap partisipasi masyarakat terus meningkat agar kebutuhan darah di wilayah tersebut dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, PMI Buton Selatan optimistis dapat membantu mengurangi persoalan keterbatasan stok darah sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini dari PMI Buton Selatan, donor darah yang berhasil dikumpulkan yaitu 83 pendonor terdiri dari Golongan Darah A berjumlah 22 kantong, Golongan Darah B berjumlah 19 kantong, Golongan Darah AB berjumlah 5 kantong, dan Golongan Darah O berjumlah 37 kantong.*

Hibah atau Waris? ATR/BPN Ungkap Cara Tepat Proses Balik Nama Sertipikat Tanah Orang Tua ke Anak

inan ke bank. Kondisi tersebut sering membuat proses terasa lebih rumit karena dokumen belum disiapkan sejak awal.

Menurut Shamy, penundaan pengurusan berpotensi meningkatkan biaya akibat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), denda administrasi, serta pembaruan dokumen yang belum dilakukan.

“Kalau semakin ditunda, biasanya biaya makin meningkat dan terasa mahal,” katanya.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tahapan utama yang harus dilalui, mulai dari penentuan dasar hukum peralihan hak, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pembayaran pajak, hingga pencatatan resmi di Kantor Pertanahan.

Shamy menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara hibah dan waris. Hibah dilakukan saat orang tua masih hidup, sedangkan waris berlaku setelah pemilik meninggal dunia.

“Kalau salah menentukan sejak awal, bisa berakibat pengurusannya berulang lagi dari proses awal,” ujarnya.

Adapun biaya yang timbul dalam proses tersebut meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban-

gunan (BPHTB), biaya pembuatan akta, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan.

Perhitungan biaya layanan pertanahan umumnya didasarkan pada nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi seribu. Estimasi biaya juga dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam pengurusan waris, pemohon wajib melampirkan sejumlah dokumen seperti formulir permohonan bermaterai, identitas ahli waris, sertifikat tanah asli, akta kematian, serta Surat Keterangan Waris.

Selain itu, diperlukan pula dokumen tambahan berupa SPPT dan PBB tahun berjalan, bukti pembayaran BPHTB, serta Pajak Penghasilan (PPH) untuk objek tanah dengan nilai tertentu.

Sementara itu, dalam skema hibah, dokumen utama yang harus dipenuhi antara lain akta hibah yang dibuat oleh PPAT, identitas pemberi dan penerima hibah, serta sertifikat tanah asli.

Sejumlah dokumen pendukung lain seperti izin pemindahan hak, SPPT, dan bukti pembayaran pajak juga wajib dilampirkan agar proses dapat berjalan lancar.

Secara historis, sistem pendaftaran

tanah di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang menjadi dasar hukum pengaturan agraria nasional. Modernisasi layanan pertanahan terus dilakukan, termasuk melalui digitalisasi layanan publik.

Di tingkat global, praktik administrasi pertanahan yang transparan dan tertib menjadi indikator penting dalam kemudahan berusaha. Bank Dunia melalui indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) menempatkan pendaftaran properti sebagai salah satu komponen utama yang memengaruhi iklim investasi.

Shamy menambahkan bahwa kepastian hukum atas tanah tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial secara luas.

“Pengurusan yang tertib akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik baru dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menunda proses balik nama setelah terjadi peralihan hak agar administrasi pertanahan tetap tertib dan biaya dapat dikendalikan.*

Wa Ode Munanah Lantik DWP Buton Selatan 2024- 2029, Bupati H Muh Adios Harap DWP Jadi Motor Pemberdayaan Keluarga dan Hadirkan Program Nyata untuk Warga

menegaskan bahwa DWP memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

“Organisasi ini bukan sekadar pendamping, tetapi bagian dari kekuatan sosial yang harus mampu mendorong perubahan nyata di masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga meminta agar kepengurusan baru tidak hanya menjalankan program formal, tetapi menghadirkan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

“Bangun program kerja yang konkret, yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Bupati menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan komitmen

seluruh pengurus dalam menjalankan amanah organisasi agar kepercayaan publik tetap terjaga dan peran DWP semakin kuat di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Munanah Asrun Lio menekankan pentingnya sinergi antara DWP kabupaten dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran organisasi.

“DWP harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan sosial,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa DWP memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga serta menjadi motor penggerak pemberdayaan perempuan di daerah.

Dari sisi historis, organisasi Dharma Wanita di Indone-

sia telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi. Pada 1999, organisasi ini bertransformasi menjadi Dharma Wanita Persatuan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap perubahan struktur pemerintahan dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional.

Secara global, penguatan peran organisasi perempuan juga selaras dengan agenda internasional sejak Konferensi Dunia Perempuan di Beijing tahun 1995 yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di tingkat lokal, penguatan DWP Buton Selatan ini diharapkan menjadi

titik awal penguatan program kerja yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, serta sosial kemasyarakatan.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, pemerintah daerah berharap DWP Buton Selatan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia dan ketahanan sosial masyarakat.

Acara pengukuhan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus yang baru dilantik sebagai simbol dimulainya masa bakti 2024-2029 di lingkungan DWP Kabupaten Buton Selatan.*

PPKB Buton Selatan Siapkan Roadmap Kependudukan Berbasis Data SIGA, Susun Strategi Tekan Stunting, dan Kendalikan Penduduk

gendalian penduduk sejak era Orde Baru melalui program Keluarga Berencana yang dikenal luas hingga tingkat global sebagai salah satu model sukses.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, angka fertilitas total (TFR) Indonesia berhasil ditekan dari sekitar 5,6 pada 1970-an menjadi sekitar 2,2 dalam satu dekade terakhir. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk kualitas sumber daya manusia, terutama stunting.

Secara global, World Health Organization mencatat sekitar 22 persen anak balita di dunia mengalami stunting pada 2022, yang berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang.

Di tingkat lokal, PPKB Buton Selatan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas melalui edukasi langsung oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menjangkau hingga desa dan keca-

matan.

“Untuk program KB, kami rutin melakukan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi dengan melibatkan PLKB di seluruh wilayah,” Lanjut Karman.

Selain itu, intervensi gizi dilakukan melalui program dapur sehat yang mengedukasi masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi berbasis bahan lokal. Program ini menyoroti ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko stunting.

“Kami berikan pemahaman bagaimana mengolah makanan bergizi agar kebutuhan nutrisi keluarga terpenuhi,” tambahnya.

Tidak hanya berhenti pada edukasi, PPKB juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan guna memastikan efektivitas program. “Hasilnya kami laporkan secara harian, lalu direkap bulanan untuk evaluasi apakah terjadi perubahan pola hidup dan penurunan stunting,” jelasnya

PPKB juga turut mengawal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari intervensi nasional untuk memperbaiki status gizi masyarakat.

Menurut Karman, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga partisipasi aktif masyarakat. “Peta jalan yang kami susun akan menjadi pegangan kepala daerah dalam menentukan kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

Dengan strategi tersebut, PPKB Buton Selatan optimistis mampu berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Upaya ini juga sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan atau United Nations dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya penghapusan kelaparan dan peningkatan kesehatan masyarakat global.*

Dudung Rangkap Penasihat Presiden Usai Dilantik Kepala KSP



-Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Senin (27/4),

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Senin (27/4), dengan membawa mandat utama mengawal percepatan program strategis nasional serta memperkuat koordinasi lintas lembaga pemerintahan.

Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan dan menandai pergantian kepemimpinan dari M Qodari yang kini dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah. Pergantian ini menjadi bagian dari penataan organisasi untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada media, Dudung mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih merangkap jabatan sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional. "Masih merangkap, tapi nanti pasti segera akan ada pergantian,"

ujarnya.

Sebagai Kepala KSP, Dudung menegaskan perannya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ia berkomitmen membuka akses seluas-luasnya terhadap laporan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat respons pemerintah.

"Laporan masyarakat akan kami buka 24 jam, sehingga keluhan bisa segera ditindaklanjuti," kata Dudung menegaskan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, percepatan implementasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan pemerintahan saat ini.

"Jangan sampai ada program prioritas yang terhambat birokrasi. Kalau ada, akan kita pangkas," ujarnya.

Dudung menyebutkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah akan diperkuat guna menjaga efektivitas pelaksanaan program. Ia juga memastikan evaluasi dilakukan secara berkala agar

target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.

Secara historis, jabatan Kepala KSP kerap diisi oleh figur dengan latar belakang militer. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, posisi ini pernah dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko, yang turut memperkuat peran KSP dalam koordinasi kebijakan strategis.

Di tingkat internasional, peran lembaga serupa KSP dapat disandingkan dengan kantor staf eksekutif di berbagai negara, seperti White House Chief of Staff di Amerika Serikat yang berfungsi sebagai pengatur agenda dan koordinasi Presiden. Model ini menunjukkan pentingnya posisi staf kepresidenan dalam menjaga efektivitas pemerintahan.

Dudung sendiri merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Karier militernya mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Guber-

nur Akademi Militer hingga Pangdam Jaya dan Pangkostrad.

Pengalamannya di bidang teritorial dan kepemimpinan lapangan dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas di KSP, terutama dalam memastikan program pemerintah berjalan hingga tingkat daerah.

Dengan latar belakang tersebut, Dudung optimistis mampu menjalankan amanah sebagai Kepala KSP sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam merespons kebutuhan masyarakat.

"Kami akan bekerja cepat, tepat, dan terukur demi memastikan program Presiden benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Penunjukan Dudung sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan program strategis nasional, di tengah tantangan birokrasi dan dinamika pembangunan yang terus berkembang. (*)

Jumhur Hidayat Resmi Jadi Menteri LH, Aktivistis Buruh Masuk Kabinet



Mohammad Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.

JAKARTA, BP-Mohammad Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Penunjukan ini menandai masuknya figur berlatar aktivisme buruh ke dalam jajaran kabinet, sekaligus membawa perspektif baru dalam pengelolaan isu lingkungan hidup nasional.

Pelantikan tersebut berlangsung di Jakarta dan menjadi bagian dari dinamika penyegaran kabinet di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat sinergi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Jumhur dikenal sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), organisasi buruh besar di Indonesia. Latar belakangnya sebagai aktivis dinilai memberi warna tersendiri dalam pendekatan kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap kelompok pekerja.

"Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Pekerja dan masyarakat kecil harus menjadi bagian dari solusi," ujar Jumhur dalam pernyataannya usai pelantikan.

Karier Jumhur tidak lepas dari dinamika politik nasional sejak era Orde Baru. Saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, ia aktif dalam gerakan yang menentang kebijakan pemerintah, termasuk isu agraria dan ketimpangan sosial.

Aktivitas tersebut

berujung pada penangkapan pada 1989. Ia divonis tiga tahun penjara karena keterlibatannya dalam demonstrasi mahasiswa. Pengalaman itu menjadi bagian penting dalam pembentukan pandangan politik dan sosialnya.

"Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga untuk memperjuangkan keadilan secara konstitusional," kata Jumhur dalam salah satu forum diskusi publik.

Setelah bebas pada 1992, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Nasional dan kemudian meraih gelar Magister Sosiologi dari Universitas Indonesia pada 2013. Kombinasi latar belakang teknis dan sosial memperkuat kapasitasnya dalam memahami isu pembangunan.

Di tingkat internasional, Jumhur pernah terlibat dalam solidaritas global, termasuk aksi dukungan terhadap demonstrasi mahasiswa di Tiananmen Square pada 1989. Peristiwa tersebut menjadi simbol penting dalam sejarah gerakan demokrasi dunia.

Selain itu, ia aktif dalam berbagai forum internasional seperti International Labor Conference (ILC) yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO). Keterlibatan ini memperluas jejaring serta perspektif globalnya dalam isu ketenagakerjaan dan kebijakan publik.

Pengalaman birokrasi Jumhur dimulai saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Kepala BNP2TKI pada 2007. Dalam posisi tersebut, ia fokus pada perlindungan pekerja migran dan pemberantasan perdagangan manusia.

"Perlindungan pekerja migran adalah bagian dari tanggung jawab negara yang

tidak bisa ditawar," ujarnya dalam laporan kinerja saat menjabat.

Setelah tidak lagi menjabat, Jumhur kembali aktif dalam gerakan buruh dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga mendirikan sejumlah organisasi yang berfokus pada penguatan sektor informal dan UMKM.

Pada 2020, ia kembali menjadi sorotan setelah memimpin penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi tersebut berujung pada proses hukum dan vonis 10 bulan penjara terkait penyebaran informasi yang dinilai sebagai hoaks.

Secara historis, keterlibatan aktivis dalam pemerintahan bukan hal baru di Indonesia. Pasca Reformasi 1998, sejumlah tokoh gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil turut mengisi jabatan publik, mencerminkan transisi demokrasi yang lebih terbuka.

Di tingkat global, fenomena serupa juga terjadi, di mana aktivis sosial masuk ke dalam pemerintahan untuk mendorong kebijakan berbasis keadilan sosial dan lingkungan, seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan.

Dengan latar belakang panjang sebagai aktivis, birokrat, dan pemikir, Jumhur kini menghadapi tantangan besar dalam memimpin sektor lingkungan hidup. Sinergi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian alam menjadi ujian utama di tengah tekanan global terhadap komitmen iklim Indonesia.

Pelantikan ini sekaligus menandai harapan baru terhadap arah kebijakan lingkungan hidup nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)

Ribuan Warga Kendari Padati Pawai Budaya HUT ke-62 Sultra, Gubernur Sultra ASR Saksikan Semarak Pawai Budaya di Kawasan MTQ



Ribuan masyarakat larut dalam tarian lulo massal yang menjadi penutup rangkaian Pawai Budaya Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara

Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Ribuan masyarakat larut dalam tarian lulo massal yang menjadi penutup rangkaian Pawai Budaya Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara di kawasan MTQ Kendari, Jumat (24/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh nuansa kebersamaan.

Lulo massal yang melibatkan peserta pawai dan masyarakat umum menjadi simbol persatuan lintas budaya di Sulawesi Tenggara. Tradisi ini sejak lama dikenal sebagai tarian pergaulan khas masyarakat Tolaki yang mencerminkan nilai kebersamaan dan kesetaraan.

Sebelumnya, pawai budaya digelar dengan menampilkan beragam kekayaan tradisi dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Iring-iringan peserta memulai perjalanan dari UPTD Museum dan Taman Budaya Sultra menuju venue utama MTQ Kendari.

Sepanjang rute, masyarakat tampak antusias menyaksikan penampilan peserta yang mengenakan pakaian adat serta menampilkan seni pertunjukan

khas daerah. Suasana semakin semarak dengan kehadiran berbagai kelompok seni dan organisasi.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka hadir langsung menyaksikan kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK, serta para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Dari tribun utama, gubernur memberikan apresiasi atas partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memeriahkan peringatan hari jadi provinsi tersebut.

“Kegiatan ini bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk memperkuat identitas budaya dan persatuan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Andi Sumangerukka.

Pawai budaya secara resmi dilepas oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Muhammad Fadlansyah. Ia menegaskan pentingnya pelestarian budaya di tengah arus modernisasi.

“Pawai budaya dalam rangka HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi saya nyatakan dilepas,” kata Fadlansyah.

Peserta pawai be-

rasal dari berbagai unsur, mulai dari Paskibraka, Polri, komunitas Tamalaki, hingga organisasi seperti PKK, Dekranasda, BKMT, dan pelaku UMK. Selain itu, turut tampil marching band dari SMA Negeri 4 Kendari dan SMAN 13 Konawe Selatan.

Keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten dan kota menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan identitas daerah.

Secara historis, Provinsi Sulawesi Tenggara resmi terbentuk pada tahun 1964 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sejak saat itu, perayaan hari ulang tahun provinsi menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman etnis, seperti Tolaki, Buton, Muna, dan Wakatobi.

Dalam konteks nasional, pawai budaya dan festival daerah telah lama menjadi bagian dari strategi pelestarian budaya, sejalan dengan upacara pemerintah Indonesia dalam menjaga keberagaman yang diakui dun-

ia melalui konsep “Bhinneka Tunggal Ika”.

Sementara itu, secara global, kegiatan serupa juga dilakukan di berbagai negara sebagai bentuk diplomasi budaya, seperti festival budaya di Asia dan Eropa yang memperkuat identitas sekaligus menarik sektor pariwisata.

Ketua TP PKK Sultra dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci suksesnya kegiatan.

“Partisipasi masyarakat sangat luar biasa, ini menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal masih sangat kuat,” ujarnya.

Dengan mengusung tema “Produktif untuk Sultra Sejahtera”, peringatan HUT ke-62 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga mendorong pembangunan berbasis budaya.

Kegiatan pawai budaya dan lulo massal ini pun menjadi bukti bahwa kekayaan tradisi lokal tetap relevan di tengah perkembangan zaman, sekaligus memperkuat jati diri daerah di kancah nasional maupun internasional. (*)

Gubernur Sultra ASR Resmikan Pusat UMKM di Kawasan MTQ Kendari, Dorong Ekonomi Berbasis Lokal



Sekitar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam pameran

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Sekitar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam pameran yang menjadi rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 provinsi tersebut. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan MTQ Kendari ini diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, pada Jumat (24/4/2026).

Peresmian stand UMKM tersebut menjadi momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

Usai peresmian, Gubernur bersama rombongan langsung meninjau area pameran, berinteraksi dengan pelaku usaha, serta mengamati berbagai produk unggulan yang dipamerkan, mulai dari kerajinan tangan hingga olahan pangan khas Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran UMKM dalam menopang ekonomi daerah. “UMKM adalah sektor yang terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis, termasuk saat pandemi global beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran stand UMKM dalam perayaan HUT Sultra bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. “Kami ingin memastikan UMKM Sultra mampu berkembang dan menembus pasar yang lebih luas,” katanya.

Prosesi peresmian sendiri ditandai dengan penggantung pita bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perwakilan Bank Indonesia, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Utama Perumda, Pelaksana Harian Sekda Sultra, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk turut meramaikan stand UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal. “Mari kita cintai dan gunakan produk daerah sendiri sebagai bagian dari penguatan ekonomi kita,” ujarnya.

Secara historis, sektor UMKM di Indonesia telah lama menjadi penopang utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan

menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Di tingkat global, penguatan UMKM juga menjadi perhatian utama banyak negara, terutama setelah krisis ekonomi dunia dan pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020. Organisasi internasional seperti OECD dan Bank Dunia mendorong negara-negara untuk memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan tren tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya menghadirkan berbagai program pemberdayaan UMKM, termasuk melalui pameran, pelatihan, hingga akses pembiayaan.

Gubernur menilai, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antar pelaku usaha. “Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang bertemunya inovasi, kreativitas, dan peluang pasar,” katanya.

Peringatan HUT ke-62 Sulawesi Tenggara sendiri menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan daerah sejak terbentuk pada 1964, sekaligus momentum memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal.

Melalui pameran UMKM ini, pemerintah berharap geliat ekonomi daerah semakin meningkat, serta mampu mendorong pelaku usaha lokal naik kelas dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (*)

HUT ke-62 Sultra Dorong Ekonomi, Bupati Buton Alvin Akawijaya Perkuat Sinergi



Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Tugu Religi MTQ Kendari, Jumat malam (24/4/2026)

Pewarta: La Harman

SULTRA, BP - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Tugu Religi MTQ Kendari, Jumat malam (24/4/2026), menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan yang mengusung tema "Produktif untuk Sultra Sejahtera" tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang transaksi ekonomi yang signifikan dengan potensi perputaran hingga Rp3 miliar.

Ketua panitia, M. Ridwan Badallah, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 75.000 hingga 85.000 orang selama rangkaian kegiatan berlangsung. "Ini bukan sekadar panggung hiburan, tetapi juga menjadi ruang transaksi ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, sebanyak 24

kegiatan diselenggarakan dengan melibatkan sekitar 6.000 peserta. Tingginya partisipasi ini mencerminkan kuatnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Pembukaan kegiatan secara resmi dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi. Mari kita nikmati rangkaian kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan pembangunan," kata Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra turut hadir dan menunjukkan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal.

Usai acara pembukaan, Bupati Buton mengunjungi stan pameran daerah untuk

melihat langsung produk unggulan yang dipamerkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami ingin memastikan produk lokal mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Alvin.

Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan ini juga menjadi simbol penguatan sinergi antar pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Secara historis, Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk pada tahun 1964 telah mengalami berbagai fase pembangunan. Momentum peringatan HUT setiap tahun menjadi refleksi atas capaian sekaligus tantangan ke depan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks nasional, perayaan hari jadi daerah sering dimanfaatkan sebagai sarana men-

orong ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.

Sementara itu, secara global, konsep festival ekonomi lokal juga diterapkan di berbagai negara sebagai strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menggerakkan sektor informal dan kreatif.

Dengan demikian, peringatan HUT ke-62 Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Momentum ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (*)

Pemkab Buton Tengah Gandeng Bulog, Stabilkan Harga Beras dan Minyak



Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Perum Bulog Sulawesi Tenggara resmi mengoperasikan gudang transit di Kecamatan Lakudo

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Perum Bulog Sulawesi Tenggara resmi mengoperasikan gudang transit di Kecamatan Lakudo sebagai langkah strategis menekan harga pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok di wilayah tersebut, Rabu (15/4/2026).

Pengoperasian gudang tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan Bulog yang ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan bersama dengan para mitra pangan di Gudang Filial Buton Tengah.

Bupati Buton Tengah Dr Azhari mengatakan langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya harga bahan pokok pasca Lebaran yang sempat membebani masyarakat.

"Hari ini kita wujudkan solusi konkret. Gudang transit ini menjadi langkah awal sebelum gudang permanen Bulog dibangun di Buton Tengah," ujar Azhari dalam sambutannya.

Menurut Azhari, kehadiran gudang transit tersebut akan mempercepat distribusi bahan pangan, khususnya beras program SPHP, sehingga harga di tingkat konsumen dapat ditekan lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ia menyebutkan harga beras SPHP di Buton Tengah kini dapat dijaga pada kisaran Rp60.000 hingga Rp61.000 per karung, lebih rendah dibandingkan HET Rp62.500. Untuk wilayah terluar seperti Kecamatan Talaga, harga maksimal dipatok Rp62.000.

Selain beras, pemerintah daerah juga melakukan intervensi terhadap harga minyak goreng dengan menetapkan kisaran harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter di tingkat pasar.

Perwakilan Bulog Sulawesi Tenggara, Nurhayati, menilai penyediaan gudang transit oleh pemerintah daerah menjadi langkah cepat dan efektif dalam mendukung operasional distribusi pangan sebelum gudang permanen tersedia.

"Terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungan fasilitas ini. Gudang sementara ini sangat membantu kelancaran distribusi sembako dengan harga terjangkau," kata Nurhayati.

Ia menjelaskan bahwa mitra yang dilibatkan dalam program ini merupakan kios pangan binaan yang telah melalui proses verifikasi bersama, termasuk melibatkan Satgas Pangan, terutama karena adanya subsidi pemerintah pusat sebesar Rp1.600 per kilogram untuk beras SPHP.

Azhari menegaskan, pemerintah daerah akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi kios mitra resmi serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga.

"Kalau ada yang menjual di atas harga yang ditetapkan, kerja sama langsung kita putus. Tidak boleh ada permainan harga," tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Buton Tengah juga berencana mengalokasikan subsidi tambahan melalui APBD Perubahan guna semakin menekan harga pangan, bahkan ber-

potensi menurunkan harga beras di bawah Rp60.000 per karung.

Dari sisi historis, peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya lembaga ini pada 1967, terutama dalam menjaga stok dan harga beras sebagai komoditas strategis nasional.

Secara global, intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga pangan juga dilakukan di berbagai negara melalui lembaga logistik dan cadangan pangan nasional, seperti Food Corporation di India maupun National Food Authority di Filipina, yang berfungsi menjaga ketahanan pangan dan melindungi daya beli masyarakat.

Kebijakan stabilisasi pangan ini menjadi semakin penting di tengah fluktuasi harga komoditas global akibat gangguan rantai pasok dan perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan dunia.

Dengan beroperasinya gudang transit di Lakudo, distribusi pangan di Buton Tengah diharapkan menjadi lebih efisien dan merata, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pemerintah daerah pun optimistis pembangunan gudang permanen Bulog dapat segera terealisasi dengan target tender perencanaan dimulai pada Mei 2026 dan pembangunan fisik pada September 2026.

"Ini bukan akhir, tetapi awal dari sistem distribusi pangan yang lebih baik di Buton Tengah," ujar Azhari.

Keberadaan gudang transit ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Hoaks Vaksin Meningkat, Kemenkes Fokus Perbaiki Komunikasi Publik



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik sebagai strategi utama dalam meningkatkan cakupan imunisasi nasional di tengah maraknya disinformasi yang beredar di masyarakat. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan yang digelar dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2026 di Jakarta, Selasa (21/4).

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital Kemenkes, Maroli J. Indarto, menyampaikan bahwa fenomena infodemi membuat hoaks terkait vaksin menyebar lebih cepat dibandingkan informasi berbasis bukti medis. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam membangun kepercayaan masyarakat.

"Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang menyentuh masyarakat," ujar Maroli dalam forum tersebut.

Ia menambahkan, meskipun cakupan imunisasi lengkap anak usia 12-23 bulan pada 2025 telah mencapai 76,9 persen, namun kualitas komunikasi di tingkat akar rumput masih memerlukan penguatan agar

pesan kesehatan dapat diterima secara efektif. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengungkapkan bahwa fenomena anak tanpa imunisasi atau zero dose masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, rendahnya partisipasi imunisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga paparan informasi keliru yang masif di ruang digital.

"Rekan-rekan humas harus menjadi garda terdepan dalam membersihkan hoaks kesehatan dan memperkuat pesan positif secara masif," kata Aji.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa cakupan imunisasi bayi dan baduta lengkap hingga 2025 belum merata. Bahkan cakupan imunisasi anak sekolah masih berada di bawah 88 persen, sementara jumlah anak zero dose DPT-HB-Hib mencapai 991.022 pada 2025, meningkat dibandingkan 2024.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksiono Harbuwono, menegaskan bahwa tantangan terbesar program imunisasi saat ini bukan hanya pada aspek layanan, melainkan komunikasi publik yang efektif.

"Kita menghadapi arus misinformasi dan

disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin hingga narasi menyesatkan yang melemahkan kepercayaan masyarakat," ujar Dante.

Ia menambahkan, transformasi sistem kesehatan nasional menempatkan komunikasi publik sebagai pilar strategis yang membutuhkan orkestrasi kuat dan kolaborasi lintas sektor.

Forum Bakohumas tahun ini mengusung tema "Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya". Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas komunikasi sekaligus memperluas jejaring antarinstitusi pemerintah.

Diskusi panel dalam forum tersebut turut menghadirkan Direktur Imunisasi Indri Yogaswari, pakar big data Ismail Fahmi, serta influencer kesehatan Mohamad Hildan yang membahas situasi imunisasi hingga analisis media sosial terkait gerakan anti-vaksin.

Dalam konteks historis, program imunisasi telah terbukti menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mencatat imunisasi berhasil mencegah jutaan kematian setiap tahun sejak diperkenalkan secara luas pada dekade 1970-an melalui Expanded

Programme on Immunization (EPI).

Di Indonesia, program imunisasi nasional telah berjalan sejak 1977 dan terus berkembang, termasuk dengan diperkenalkannya vaksin kombinasi DPT-HB-Hib untuk meningkatkan perlindungan anak terhadap berbagai penyakit menular berbahaya.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan global berupa keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy) meningkat, bahkan oleh World Health Organization pernah dimasukkan sebagai salah satu ancaman kesehatan global pada 2019.

Melalui forum ini, pemerintah mendorong pendekatan prebunking sebagai strategi komunikasi preventif, yaitu mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali dan menolak hoaks sebelum tersebar luas.

"Dengan lebih dari 10.000 pranata humas di seluruh Indonesia, ini merupakan kekuatan besar untuk melakukan kontra-narasi jika digerakkan secara serempak," ujar Maroli menegaskan.

Sinergi lintas instansi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap imunisasi, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak kesehatan secara merata di tengah tantangan era digital yang kian kompleks. (*)

Remaja Rentan Depresi, Kemenkes Perkuat Literasi Mental Remaja Lewat Program Sekolah Nasional

Peliput: Lisna

JAKARTA, BP-Upaya meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa remaja terus diperkuat Kementerian Kesehatan RI melalui pendekatan edukatif di lingkungan sekolah. Salah satunya diwujudkan lewat kegiatan bedah buku Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis bagi First Aider di Sekolah yang digelar di Aula Siwabessy, Gedung Prof. Sujudi, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas literasi kesehatan mental di kalangan pelajar SMP dan SMA, sekaligus membekali mereka kemampuan dasar dalam mengenali serta merespons persoalan psikologis di sekitar.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai langkah berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan jiwa sejak usia dini.

"Melalui bedah buku ini, kami ingin menghadirkan panduan praktis bagi pelajar agar mampu memahami kondisi mental teman sebaya serta memberikan respons awal yang tepat," ujar Aji.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga institusi pendidikan dan mitra pembangunan.

Lebih dari 100 peserta yang terdiri atas siswa, guru, dan perwakilan berbagai sektor turut ambil bagian dalam kegiatan yang

bertepatan dengan peringatan Hari Buku Sedunia tersebut. Program ini direncanakan berlangsung dalam tiga seri sepanjang 2026 guna menjangkau lebih banyak sekolah di berbagai daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksiono Harbuwono, menyoroti tingginya kerentanan remaja terhadap gangguan kesehatan mental yang kerap tidak terlihat secara kasatmata.

"Luka psikologis sering kali tersembunyi, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak remaja yang tampak baik-baik saja, padahal sedang berjuang dalam diam," kata Dante.

Berdasarkan hasil Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022, sekitar satu dari tiga remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam satu tahun terakhir. Bahkan, tingkat gejala depresi dan kecemasan pada remaja dilaporkan hampir lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa.

Secara global, World Health Organization mencatat bahwa sekitar 14 persen remaja di dunia mengalami gangguan kesehatan mental, menjadikannya salah satu penyebab utama beban penyakit pada kelompok usia muda. Data historis ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental remaja bukan hanya persoalan nasional, melainkan tantangan global yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir.

Di Indonesia sendiri, perhatian terhadap kesehatan jiwa mulai menguat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa, yang menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif. Sejak saat itu, berbagai program berbasis komunitas dan sekolah terus dikembangkan.

Dante menegaskan bahwa keterampilan memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis tidak harus dimiliki oleh tenaga profesional saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa pun dengan dasar empati dan kepedulian.

"Kalian tidak harus menjadi ahli. Cukup hadir, mendengarkan tanpa menghakimi, dan berani mengatakan bahwa seseorang tidak sendirian,"ujarnya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk berperan aktif sebagai first aider di lingkungan masing-masing, terutama dalam membantu teman sebaya yang mengalami tekanan emosional.

"Jadilah alasan seseorang merasa tidak sendirian hari ini," kata Dante menutup sambutannya.

Melalui kegiatan ini, Kemenkes berharap pelajar tidak hanya memahami pentingnya kesehatan mental, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan lingkungan sekolah yang lebih suportif dan inklusif terhadap persoalan psikologis.

Ke depan, sinergi lintas sektor diharapkan semakin kuat guna memastikan setiap remaja memiliki akses terhadap dukungan mental yang memadai sejak dini, sebelum mendapatkan penanganan profesional. (*)

PT FAREN GRAFIKA



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasctio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com
Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Satu Pelaku Air Keras di Cengkareng Ditangkap, Lainnya Diburu Polisi



Ilustrasi. Polisi menangkap salah satu pelaku penyiraman air keras terhadap seorang pria di wilayah Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Seorang pria menjadi korban penyiraman cairan yang diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (27/4/2026) sore. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.31 WIB dan sempat terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Korban saat itu tengah mengendarai sepeda motor listrik di Jalan Dharma Wanita V, sebelum dihampiri oleh dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis skuter matik. Aksi penyerangan terjadi di jalan umum dengan kondisi lalu lintas relatif ramai.

Dalam rekaman video yang beredar, kedua kendaraan tampak melaju beriringan sebelum akhirnya berhenti sejajar. Ketegangan muncul ketika korban dan pelaku terlibat adu mulut di tengah jalan.

Tak lama setelah cekcok tersebut, salah satu pelaku yang mengenakan hoodie hitam ter-

lihat menyiramkan cairan dari dalam botol ke arah korban. Cairan tersebut diduga kuat merupakan air keras yang dapat menyebabkan luka serius pada tubuh.

Usai melakukan aksinya, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka kemudian menghentikan kendaraannya dan mendapat pertolongan dari warga sekitar.

Warga yang berada di lokasi segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, kondisi korban belum dijelaskan secara rinci oleh pihak berwenang.

Kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi. Upaya tersebut dilakukan untuk mengungkap identitas dan motif para pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Par-

man Gultom, mengatakan pihaknya telah berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku. "Sudah diamankan satu pelaku di Polda Metro Jaya," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. "Kami masih melakukan pengejaran terhadap adap pelaku lain yang melarikan diri," kata Parman.

Selain itu, polisi juga terus mengumpulkan bukti tambahan, termasuk rekaman video dan keterangan saksi, guna memperkuat proses penyidikan. "Pemeriksaan saksi dan pendalaman motif masih berlangsung," ujarnya.

Kasus penyiraman air keras bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa sempat menjadi perhatian publik, salah satunya penyerangan terhadap penyidik senior KPK,

Novel Baswedan, pada 2017 yang menimbulkan luka serius pada bagian wajah dan mata.

Secara global, serangan menggunakan air keras juga tercatat terjadi di sejumlah negara, seperti di India dan Bangladesh, yang bahkan mendorong lahirnya regulasi ketat terkait penjualan bahan kimia berbahaya tersebut.

Di Indonesia sendiri, berbagai pihak telah mendorong penguatan regulasi dan pengawasan terhadap distribusi bahan kimia berbahaya untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Hingga saat ini, kepolisian masih mendalami motif di balik aksi penyiraman tersebut, termasuk kemungkinan adanya konflik pribadi antara korban dan pelaku.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya keamanan di ruang publik serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan menggunakan bahan berbahaya. (*)

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Koalisi Sipil, Fadli Zon Sebut Putusan Sesuai Harapan



Menteri Kebudayaan Fadli Zon

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas memastikan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan tidak menerima gugatan terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai dugaan pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Langkah hukum lanjutan itu disampaikan pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Daniel Winarta, dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Rabu (22/4). Ia menegaskan bahwa pihaknya akan membawa perkara tersebut ke tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

"Yang pasti upaya banding akan kami ajukan lebih lanjut," ujar Daniel.

Putusan yang dipersoalkan dijatuhkan pada 21 April 2026. Majelis hakim menyatakan PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut karena objek sengketa dinilai bukan keputusan tata usaha negara.

Hakim menilai pernyataan Fadli Zon tidak memenuhi unsur keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final. Oleh karena itu, gugatan koalisi dinyatakan tidak dapat diterima.

Menanggapi putusan tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa keputusan pengadilan telah sesuai dengan pandangannya. Ia menyebut tidak terdapat bukti kuat yang mendukung adanya pemerkosaan massal yang terstruktur pada 1998.

"Saya pikir putusan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan," kata Fadli saat berada di Beijing, Minggu (26/4).

Ia menambahkan bahwa kemungkinan adanya tindak kekerasan seksual tetap ada, namun tidak dilakukan secara sistematis atau melibatkan aktor negara. "Kalau ada, itu bukan state actor dan bukan sistematis," ujarnya.

Pernyataan yang menjadi objek gugatan sebelumnya disampaikan Fadli dalam sebuah sinir pada 10 Juni 2025 dan diperkuat melalui pernyataan resmi pada 16 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Fadli menyatakan laporan tersebut tidak didukung bukti kuat dan mengingatkan agar pembahasan sejarah tidak merugikan citra bangsa. Ia juga menegaskan bahwa pandangannya tidak berkaitan dengan penyusunan ulang buku sejarah oleh Kementerian Kebudayaan.

"Itu tidak ada kaitannya dengan buku sejarah," kata Fadli.

Koalisi sipil, di sisi lain, menilai pernyataan tersebut merupakan tindakan administratif pemerintahan yang seharusnya dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara. Dalam memori banding, mereka akan menekankan aspek tersebut.

Menurut Daniel, pernyataan yang disampaikan melalui kanal resmi, termasuk media sosial dan siaran pers, merupakan bagian dari tindakan faktual pemerintah. "Ini merupakan tindakan faktual yang seharusnya diselesaikan

melalui mekanisme peradilan tata usaha negara," ujarnya.

Secara historis, peristiwa kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu fase krusial dalam transisi politik Indonesia yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Laporan TGPF yang dibentuk pasca-kejadian mencatat adanya berbagai bentuk kekerasan, termasuk dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam konteks global, kasus kekerasan seksual dalam konflik atau kerusuhan juga pernah menjadi perhatian dunia internasional, seperti dalam konflik Bosnia pada 1990-an dan peristiwa Nanjing Massacre di China pada 1937, yang kerap dijadikan rujukan dalam diskursus tentang kejahatan berbasis gender.

Perdebatan mengenai interpretasi sejarah dan pembuktian hukum atas peristiwa 1998 hingga kini masih menjadi isu sensitif di Indonesia. Sejumlah pihak mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum dan penguatan negara terhadap korban.

Dengan diajukannya banding oleh koalisi sipil, sengketa ini diperkirakan akan berlanjut dan berpotensi memperluas perdebatan publik mengenai batas kewenangan pejabat negara dalam menyampaikan pernyataan serta tanggung jawab terhadap narasi sejarah. (*)

Qori Cilik Internasional Tiba di Baubau, Kehadiran Zian Fahrezi Jadi Spirit Generasi Qurani Baubau



Penampilan memukau Qori cilik internasional Muhammad Zian Fahrezi menutup rangkaian penyambutan di Kota Baubau, Senin (27/4/2026).

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Penampilan memukau Qori cilik internasional Muhammad Zian Fahrezi menutup rangkaian penyambutan di Kota Baubau, Senin (27/4/2026). Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibawakannya dengan suara merdu berhasil menghipnotis para hadirin dalam kegiatan silaturahmi di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.

Kehadiran Zian Fahrezi di Baubau menjadi momen penting menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kota Baubau yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (28/4/2026) di Lapangan Lembah Hijau.

Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam yang mewakili Pemerintah Kota Baubau menegaskan bahwa kehadiran qori muda tersebut merupakan sumber inspirasi bagi generasi muda di daerah.

"Kami sangat bersyukur dan bangga dapat menyambutaninya langsung ananda Zian Fahrezi. Ini menjadi energi positif menjelang MTQ tingkat kota," ujar La Ode Darus Salam dalam sambutannya.

Ia menambahkan, pengalaman serupa pernah terjadi pada 2016 saat Baubau menghadirkan Syamsuri Firdaus, qori muda asal Bima yang kini telah dikenal di tingkat internasional.

"Dulu kita menyambutaninya saat masih belia. Hari ini, kita melihat potensi yang sama pada Zian Fahrezi," katanya.

Kedatangan Zian Fahrezi di Bandara Betoambari sebelumnya disambut secara resmi oleh jajaran pemerintah daerah bersama Kepala Kementerian Agama Kota Baubau serta tokoh masyarakat. Ia kemudian diarak menuju lokasi pertemuan bersama para pelajar dan tenaga pendidik.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan kritik kepada sejumlah sekolah yang dinilai kurang aktif dalam mendorong siswa mengikuti kompetisi, baik akademik maupun non-akademik.

"Kami tidak ingin ada sekolah yang menghambat potensi anak. Semua bakat harus difasilitasi dan dikembangkan," tegasnya.

Menurutnya, pembinaan bakat, khususnya di bidang keagamaan, harus menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan. Ia bahkan meminta laporan khusus terkait sekolah yang tidak aktif dalam kegiatan pengembangan siswa.

Sementara itu, kehadiran Zian Fahrezi di Baubau tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Haji Basri Umar beserta keluarga yang berperan sebagai sponsor kegiatan tersebut.

Dalam perspektif historis, ajang MTQ di Indonesia telah menjadi sarana penting dalam membina generasi Qurani sejak pertama kali digelar secara nasional pada 1968 di Makassar. Sejak saat itu, MTQ berkembang menjadi agenda rutin yang melahirkan

qori dan qorih berprestasi hingga ke tingkat internasional.

Di tingkat global, tradisi tilawah Al-Quran juga berkembang melalui berbagai kompetisi internasional, seperti Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Malaysia dan Dubai, yang menjadi panggung bagi qori dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Menutup sambutannya, La Ode Darus Salam menyampaikan apresiasi kepada orang tua Zian Fahrezi atas peran besar dalam mendidik anak melalui Al-Quran.

"Peran keluarga sangat penting dalam membentuk generasi Qurani yang unggul dan berkarakter," ujarnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi antara qori muda berprestasi dengan para pelajar di Baubau, yang diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru dalam mempelajari dan mencintai Al-Quran. (*)

TP PKK Baubau Ramaikan Cooking Competition HUT Sultra ke-62, Tunjukkan Kreasi Pangan Lokal di Harmoni Sultra 2026



Pewarta: Firman

SULTRA, BP-Pemerintah Kota Baubau menunjukkan komitmennya dalam pengembangan pangan lokal melalui partisipasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam ajang Halal Cooking Competition dan Cipta Menu Olahan Pangan Lokal yang berlangsung di Pulau Bokori, Sabtu (25/4/2026).

Kehadiran Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., bersama Wakil Wali Kota Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., di lokasi lomba menjadi bentuk dukungan langsung terhadap tim yang berlaga. Keduanya tiba usai mengikuti kegiatan bersepeda bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan para kepala daerah se-Sultra.

Partisipasi TP PKK Kota Baubau yang diwakili Pokja 3 ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Festival Bokori bertajuk Harmoni Sultra 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Baubau, Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa keikutsertaan tersebut tidak semata berorientasi pada kompetisi.

"Keikutsertaan kami di Pulau Bokori adalah wujud sinergi PKK Kota Baubau dalam memeriahkan HUT Sultra sekaligus mempromosikan po-

tensi pangan lokal agar lebih dikenal," ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai menu yang dihadirkan merupakan perpaduan antara kearifan lokal Buton dengan inovasi kuliner modern. Hidangan tersebut antara lain Kambalu Mambaka berbahan keladi, Kadampo Nila Ilulungi Kopuhu dari jantung pisang, sup rumput laut, serta minuman Telang Kaluku Mangura berbasis kelapa dan bunga telang.

Menurut Abdul Rahman, pendekatan tersebut dilakukan agar kuliner tradisional tetap relevan di tengah perkembangan industri makanan global yang semakin kompetitif.

"Menu yang kami tampilkan tidak hanya mempertahankan cita rasa tradisional, tetapi juga dikembangkan agar mampu bersaing secara modern," katanya.

Kompetisi ini menitikberatkan pada beberapa aspek penilaian, yakni inovasi pangan lokal, standar halal dalam pengolahan makanan, serta harmonisasi antara tampilan dan cita rasa.

Kehadiran chef nasional sebagai juri tamu turut meningkatkan standar penilaian sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi peserta. Para peserta berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, termasuk kalangan pelajar dan profesional.

"Dengan adanya juri profesional, peserta dituntut untuk lebih kreatif sekaligus menjaga kualitas hidangan," tambah Abdul Rahman.

Secara historis,

penguatan pangan lokal di Indonesia telah menjadi agenda nasional sejak era diversifikasi pangan pada dekade 1970-an yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada beras. Program tersebut terus berkembang hingga kini melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui gerakan PKK.

Di tingkat global, tren pemanfaatan pangan lokal juga semakin menguat, terutama sejak Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mendorong konsep ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal sebagai respons terhadap krisis pangan dunia.

Festival Bokori sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang menjadi salah satu ikon pariwisata Sulawesi Tenggara yang menggabungkan promosi budaya, ekonomi kreatif, dan kuliner lokal dalam satu rangkaian kegiatan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengoptimalkan potensi pangan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Partisipasi TP PKK Kota Baubau pun diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan inovasi kuliner berbasis kearifan lokal yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. (*)